



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
**UNIT KERJA** : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (P3ACSKB)

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ASYRAF SURYADIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **278973**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.029.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 351.000.000
2. Tanah Seluas 13.520 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
3. Tanah Seluas 12.233 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/40 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 426.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 104.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS / INNOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC/ BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 11.200.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 84.645.803

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.229.345.803

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.229.345.803



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.